

# Kewenangan komisi pemberantasan korupsi terkait penanganan tindak pidana pencucian uang = The authority of corruption eradication commision kpk in money laundering / Nena Esse Nurasifa

Nena Esse Nurasifa, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20413710&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

### <b>ABSTRAK</b><br>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2010 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, karena perlunya suatu upaya luar biasa untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Apabila melihat kinerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi di beberapa kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi seperti kasus Djoko Susilo, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam dakwaannya juga mendakwakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang kepada para terdakwa. Skripsi ini akan membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana kewenangan penyidikan KPK atas tindak pidana pencucian uang sebelum adanya tindak pidana korupsi simulator sim yang didakwakan kepada Djoko Susilo didasarkan pada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan apakah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUUXII/2015 telah tepat dalam memberikan kewenangan penuntutan tindak pidana pencucian uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

<hr>

### <b>ABSTRACT</b><br>

Corruption Eradication Commission (KPK) is an institution established by Act No. 32 of 2010 on the Corruption Eradication Commission, because the need for an extraordinary effort to to cope with, overcome, and eradicate corruption in Indonesia. When looking at the performance of the Corruption Eradication Commission in some cases of corruption handled by the KPK as the case of Djoko Susilo, KPK prosecutor, the indictment also accuse Money Laundering Section to the defendant. This paper will discuss more related to how the authority of KPK investigation on money laundering before the driving licence simulator corruption of which the accused to Djoko Susilo based on the Law on Money Laundering and whether the Constitutional Court Decision No. 77/PUU-XII/2015 has the right to authorize the prosecution of money laundering to the Corruption Eradication Commission.